

PERBEDAAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR INDIA DAN IRAN

Rahmawati, Inggi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Abstract

This article analyzes the reasons of the differences in US foreign policy towards nuclear development in India and Iran. The purpose of this study is to find out the reasons for the different policies issued by the United States towards nuclear development in India and Iran. The United States as the "leader" of the world nuclear regime plays a role in providing "validation" for other countries which are allowed to develop nuclear technology. But there was a different attitude towards nuclear development in India and Iran. This article uses the concept of National Interest and Security Dilemma to find out the reasons behind the policy. The conclusion is that there is a shift in the interests of the United States and changes in political dynamics in India and Iran and the countries around the two countries.

Keywords : United States of America, India, Iran, Nuclear, Foreign Policy

Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang alasan perbedaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir di India dan Iran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dari perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir di India dan Iran. Amerika Serikat sebagai “pemimpin” rezim nuklir dunia sangat berperan dalam memberikan “validasi” negara-negara mana saja yang diijinkan untuk mengembang teknologi nuklir. Namun terjadi sikap yang berbeda terhadap pengembangan nuklir di India dan Iran. Artikel ini menggunakan konsep *National Interest* dan *Security Dilemma* untuk mengetahui alasan-alasan dibalik kebijakan tersebut. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa terjadi pergeseran kepentingan Amerika Serikat dan perubahan dinamika politik di India dan Iran serta negara-negara sekitar kedua negara tersebut.

Kata Kunci : Amerika Serikat, India, Iran, Nuklir, Kebijakan Luar Negeri.

Pendahuluan

Pada tahun 2008, SIPRI atau *Stockholm International Peace Research* mengungkapkan data yang menyebutkan bahwa ada 9 negara pemilik senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China, India, Pakistan, Israel, dan, Korea Utara. Namun sebelumnya pada tahun 2005, hanya Amerika Serikat, China, Prancis, Rusia, dan Inggris yang diakui secara resmi oleh Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai pemilik senjata-senjata nuklir yang kemudian dikenal dengan *the nuclear club*.¹ Hal ini membuat empat negara - negara lainnya yaitu India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara serta beberapa negara-negara dan organisasi-organisasi teroris non-pemerintah lainnya yang dipercayai memiliki nuklir telah melakukan pelanggaran terhadap visi misi dan undang-undang *the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT)* dengan secara resmi menjadi 'anggota' *the nuclear club*.

Pada tahun 1945 ketika hanya Amerika Serikat (Selanjutnya akan disebut AS) yang memiliki kapabilitas untuk menghasilkan senjata nuklir, Amerika Serikat tidak terlalu menaruh perhatian lebih pada isu proliferasi nuklir. Namun pada masa sekarang ini beberapa Negara telah memiliki infrastruktur serta kapabilitas untuk membangun setidaknya alat-alat nuklir yang masih mentah. Sebagai 'pemimpin' dalam pengembangan nuklir dunia, AS sering memperlihatkan kekuatannya dalam mengontrol persebaran pengembangan nuklir dinegara-negara lain selain negara-negara yang diakui sebagai anggota *the nuclear club*. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah pengawasan AS terhadap pengembangan nuklir di negara-negara Timur Tengah.

Sikap protektif AS ini diperlihatkan juga kepada negara-negara lain di benua Asia seperti Korea Utara dan India. Semenjak Korea Utara mengembangkan nuklir pada tahun 1968, AS memberikan tekanan aneksasi serta gertakan berlanjut pada Korea Utara. Berbeda dengan pemberian tekanan kepada Korea Utara, India yang mengawali uji coba nuklirnya pada 18 Mei 1974 di Pokhran dengan nama sandi *Smiling Buddha* dan kembali melakukan uji coba kedua pada tahun 1998 yang mendapat kecaman dari masyarakat Internasional pada tahun 2005 memiliki perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat yang diberi nama *US-India Nuclear Deal 2008*.

Presiden Bush dalam penanganan atas nuklir di India ini mencoba mengambil langkah yang berbeda, dimulai pada tahun 2001 ia mencabut sanksi internasional yang dikenakan AS

¹ Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2011, hlm. 240-241.

terhadap India. Pembicaraan dan upaya persuasi-pun terus dilakukan oleh pemerintah AS – India sehingga pada tahun 2005, melalui pembicaraan awal antara PM India Momohan Singh dan presiden Bush terciptalah kesepakatan yang beri nama US-India nuclear deal 2008. Hingga pada saat kepemimpinan Presiden Barrack Obama, AS semakin gencar melakukan kerja sama dalam hal perkembangan program nuklir di India, dimana AS dan India menandatangani kontrak kerja sama nuklir terbesar senilai 27 miliar USD.

Kerangka Pemikiran

Kerangka analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam artikel ini adalah dua asumsi realis dengan konsep Kepentingan Nasional (National Interest) dan Dilemma Keamanan (Security Dilemma).

- *National Interest* (Kepentingan Nasional)

Bagi AS, keamanan dalam negeri atau *Homeland Security* menjadi prioritas utama kepentingan nasional dalam pencegahan penjajahan, penyerangan, invasi atau pun penghacuran terhadap kedaulatannya dari pihak luar yang menjadi musuhnya. Hal tersebut juga ditujukan untuk memelihara kedaulatannya dari tekanan global. Dua hal yang menjadi ancaman besar bagi Amerika Serikat merupakan serangan terorisme yang sebelumnya pernah mengubah sejarah kekuatan AS di tahun 2001 dan juga juga kepemilikan senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh oposisinya. Kepentingan untuk menjaga keamanan dalam negerinya beserta warga negaranya dimana pun mereka berada merupakan kepentingan utama yang harus dipenuhi oleh AS dalam politik global-nya.

Dalam konteks AS, kepentingan nasional yang dicapai AS dari waktu ke waktu adalah: (1) mempertahankan negara AS dan sistem konstitusionalnya; (2) perluasan eksistensi ekonomi AS dan mempromosikan produk-produknya ke luar negeri; (3) menciptakan suatu tata dunia baru atau sistem keamanan internasional yang *favorable*; (4) mempromosikan nilai-nilai demokrasi AS dan sistem pasar bebasnya (Nuchertlein, 1991). Namun dalam periode pasca perang dingin, pemerintah AS menemukan komponen-komponen baru bagi kepentingan nasionalnya. Ada tujuh aspek kepentingan nasional AS yang kemudian paling ditekankan yaitu (1) untuk mempertahankan AS, warga negaranya di dalam dan luar negeri serta para sekutunya, dari berbagai bentuk serangan langsung, (2) untuk mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional, (3) untuk mempertahankan kepentingan ekonomi AS, (4) untuk menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, (5) mencegah proliferasi senjata nuklir, (6)

untuk menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap AS serta (7) memerangi kemiskinan, kelaparan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).²

AS berasumsi bahwa peluang terjadinya konflik terbuka dengan India sebagai negara demokrasi lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan – kekuatan besar lainnya khususnya Cina dikarenakan India adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan karena itu dapat diandalkan sebagai mitra yang bisa diajak kerja sama termasuk dalam bidang keamanan. Melalui kerja sama itu AS memiliki lebih banyak sekutu untuk menghadapi Iran yang juga memiliki ambisi untuk mengembangkan nuklir. Hal ini merupakan salah satu strategi AS dalam menjalankan kebijakan kepentingan nasionalnya.

Kebijakan AS dalam menerapkan strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya kerap disebut *strategic hedging* yang merupakan salah pengembangan dari strategi *Balance of Power*. *Strategic Hedging* merupakan suatu perangkat strategi dengan tujuan untuk menghindari (atau perencanaan untuk menghindari kemungkinan) adanya suatu situasi dimana negara tidak dapat memutuskan alternatif yang lebih terang-terangan seperti *balancing*, *bandwonging*, atau, *neutrality*. Strategi ini sangat berguna untuk digunakan pada negara-negara kecil untuk menyeimbangkan dua hubungan negara *superpowers*.³ Melalui strategi ini, AS bermaksud untuk membuka peluang bagi dirinya dalam mempertahankan hubungan ekonomi yang menguntungkan seperti dalam salah satu aspek tujuan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Strategi *Hedging* ini kerap diterapkan AS di kawasan Asia khususnya pada negara Jepang dan India. Dalam pandangan Amerika Serikat, India merupakan negara strategis untuk menerapkan strategi *hedging*. Dengan strategi ini, AS mengaharapkan terciptanya sebuah kondisi yang membuat Cina dapat merivisi tatanan global dan regional yang berlaku. Sehingga dalam penerapan ini, antara Jepang, Korea Selatan dan India merupakan tiga negara pendamping Amerika Serikat di Asia. Ketiga negara tersebut mempunyai *deterence* yang tinggi, yang berada disekitar Cina yang berguna untuk meyakinkan China berpikir ulang untuk mengambil sikap positif.

² Juwono Sudarsono (dkk), *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996. Baca juga Indraya Smita Notosusanto, *Politik global Amerika Serikat Pasca Perang Dingin*, 1996, hal. 177

³ Salman, Muhammad, Geeraerts, Gustaaf, *Strategic Hedging and Balancing Model under the Unipolarity*, Midwest Political Science Association 2015, April 16-19, Chicago, USA

- ***Security Dilemma (Dilemma Keamanan)***

Security dilemma dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara. Tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lain.⁴ Jadi pada dasarnya teori *security dilemma* merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kondisi psikologi para pembuat keputusan yang didasari ketidakpercayaan dan ketidak tahuan terhadap kemampuan dan atensi pihak lain (musuh). Pertama, ketidakmampuan semua pihak untuk membedakan antara mana persenjataan ofensif dengan persenjataan *defensive*. Kemajuan teknologi yang terus berubah serta kemampuan ekonomi dapat merubah kekuatan ofensif menjadi *defensive* secara relative cepat oleh suatu negara yang tidak semuanya diketahui pihak lain. Kedua, ketidakmampuan mengetahui secara pasti apakah kekuatan persenjataan ofensif lebih baik dari pada kekuatan persenjataan *defensive*. Kekuatan suatu negara selalu berlaku secara kondisional dan rasional, tergantung pada situasi dan kondisi serta terhadap negara mana kekuatan tersebut dipergunakan. Artinya, kekuatan efektif suatu persenjataan akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta terhadap negara mana kekuatan tersebut digunakan. Hal tersebut adalah faktor pendorong dalam kesepakatan tersebut, menurut beberapa ahli.

Dengan adanya kenaikan peran China di kawasan tersebut mendorong AS untuk menjalin hubungan strategis dengan India. "Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan demokrasi terbesar di dunia untuk mengimbangi China," kata CFR Ferguson. Pemerintahan Bush "berharap bisa menempel ke India karena China adalah *star* yang sedang bersinar terang dan sedang naik daun bisa membantu mereka menangani China," kata Sokolski. Beberapa ahli mengatakan bahwa pertumbuhan hubungan ekonomi antara China dan India sangat penting bagi New Delhi bahwa kepentingannya di China tidak dapat diancam atau diganti oleh kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat.

Pakar lainnya khawatir bantuan nuklir A.S. ke India dapat mendorong persaingan nuklir yang berbahaya antara India dan China. Meski India memiliki minat kuat dalam membangun hubungan ekonomi dengan China, New Delhi masih mewaspadaikan kenaikan militer China di kawasan tersebut. Kaum intelektual internasional menilai bahwa kebijakan Amerika Serikat di Asia khususnya di India mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pihak Amerika Serikat atas kebangkitan salah satu raksasa Asia saat ini, yaitu China. Hubungan antara China dan Amerika dari dahulu tidak begitu dekat mengingat China termasuk negara memegang ideologi

⁴ Utari Romauli Sitorus, *Studi Hubungan Internasional*, diakses 12 Oktober 2016.

Komunis. Selain kebangkitan China, bagi Amerika Serikat nuklir Iran dianggap lebih berbahaya di banding Korea Utara dan Pakistan yang diaanggap *de facto* negara pemilik senjata nuklir, walaupun tidak di akui dan tidak di umumkan secara resmi.

Pembahasan

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁵ Kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor dari negeri tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.⁶

Tujuan kebijakan luar negeri suatu negara banyak jumlahnya. Kebijakan luar negeri merupakan prinsip-prinsip *survival*, mempertahankan kebutuhan negara, mempromosikan kepentingan ekonomi, memelihara keamanan negara, melindungi kehormatan negara, dan membangun kekuatan yang mampu melakukan perang jika memang diperlukan. Tujuan tersebut merupakan keinginan dan harapan golongan intelektual di dalam negara yang mengkaji suatu fase hubungan internasional. Dikatakan bahwa “*satu-satunya (angka hanya sebutan semata) sebutan persamaan semua cita-cita politik adalah kewajiban tiap golongan organisasi politik untuk mempertahankan kesatuan kekuatan..*”⁷

Dalam kebijakan luar negeri, ada beberapa pertimbangan dan prinsip-prinsip tujuan-tujuan politik luar negeri yang sesungguhnya seperti **Mempertahankan Integritas Negara, Meningkatkan Kepentingan Ekonomi, Menjamin Keamanan Nasional, Melindungi Martabat Nasional, dan Membangun Kekuasaan.**⁸ Dalam prinsip **Menjamin Keamanan Nasional**, ada tiga tahap kesiapsediaan yang penting untuk dipersiapkan. Salah satunya adalah ***Keperluan militer*** untuk memelihara keamanan nasional yang meliputi beberapa hal seperti,

⁵ Perwita, A G B dan Yani, Y M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 49.

⁶ *Ibid*

⁷ Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 500.

⁸ *Ibid*, hlm 501-504

suatu rencana strategi jangka panjang dalam menyerang dan bertahan, ditambah oleh pengkajian terus-menerus keadaan taktis yang dapat berkembang dalam menghadapi musuh-musuh potensial.⁹

Dalam Kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hal ini dipengaruhi oleh para aktor-aktor yang menjalankan politik luar negeri Amerika Serikat. Setelah era Paska-Perang Dingin ditandai dengan beberapa perubahan yang terjadi dalam polemik perpolitikan luar negeri Amerika Serikat. *Pertama*, berkurangnya minat publik Amerika Serikat terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam percaturan internasional. *Kedua*, globalisasi dan ketergantungan antarnegara meningkatkan kehadiran kepentingan domestik dalam pembuatan keputusan politik luar negeri yang akhirnya mengubah atau menyusun kebijakan luar negeri Amerika Serikat.¹⁰

Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau Traktat Antipenyebaran Nuklir, umumnya dikenal sebagai *Nuclear Non-proliferation Treaty* atau NPT, adalah perjanjian internasional yang tujuannya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir, untuk mempromosikan kerja sama dalam penggunaan damai energi nuklir, dan untuk mencapai tujuan mencapai perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata umum secara lengkap.¹¹

Nuclear Non-proliferation Treaty mulai berlaku pada tahun 1970. Pada tahun 1992, Cina dan Perancis mengaksesinya. Pada tahun 1996, Belarusia bergabung dengan Ukraina dan Kazakhstan dalam memindahkan dan mentransfer ke Federasi Rusia yang terakhir dari sisa senjata nuklir Soviet yang terletak di wilayah mereka, dan masing-masing negara ini telah menjadi bagian dari NPT, sebagai negara senjata non-nuklir. NPT adalah perjanjian pengawasan senjata yang paling banyak diterima. Kuba, Israel, India, dan Pakistan adalah satu-satunya negara besar yang bukan merupakan bagian dari NPT, sampai Korea Utara secara sepihak menarik diri — penarikan yang tidak diakui oleh 187 partai lainnya. India dan Pakistan memperoleh kemampuan senjata nuklir selama tahun 1990-an sementara tetap berada di luar NPT. Israel dikatakan memiliki kemampuan senjata nuklir yang signifikan juga di luar NPT.¹²

⁹ Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 502-503.

¹⁰ Cipto, Bambang, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran Buku, Yogyakarta, 2007, hlm 201.

¹¹ UNODA, <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>, diakses 12 Juli 2018.

¹² Victor W. Sidel, MD, and Barry S. Levy, MD, MPH, *Proliferation of Nuclear Weapons: Opportunities for Control and Abolition*, American Journal of Public Health, September 2007, Vol 97, No. 9.

Nuclear Non-proliferation Treaty membagi negara-negara di dunia menjadi dua kategori, negara pemegang senjata nuklir dan negara-negara senjata non-nuklir. Ini mendefinisikan negara-negara senjata nuklir sebagai negara yang meledakkan ledakan nuklir sebelum Januari 1967, yaitu Amerika Serikat (Peledakan Pertama pada 1945), bekas Uni Soviet (1949), Inggris Raya (1952), Prancis (1960) dan Cina (1964). NPT memperlakukan semua negara lain sebagai negara senjata non-nuklir.

Nuclear Non-proliferation Treaty ini mewajibkan 5 negara pemegang senjata nuklir asli (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China) untuk tidak mentransfer senjata nuklir, perangkat peledak nuklir lainnya, atau teknologi mereka ke negara non-senjata nuklir. Negara-negara non-senjata nuklir yang merupakan pihak dalam NPT melakukan penghindaran akuisisi atau produksi senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir, sebagai imbalan untuk akuisisi teknologi nuklir untuk kegiatan damai, seperti pembangkit listrik, dan untuk perlindungan oleh nuklir- negara senjata. Mereka juga diharuskan untuk menerima pengamanan untuk mendeteksi pengalihan bahan nuklir dari kegiatan damai untuk produksi senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya.¹³

Meskipun ada batasan mengenai ruang lingkup ketentuan perlindungan perjanjian, perlindungan ini masih akan memiliki efek yang mendalam pada negara-negara non-senjata nuklir. Karena perlindungan diterapkan "on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities" di dalam wilayah atau di bawah yurisdiksi atau kontrol negara-negara tersebut, mencakup seluruh industri nuklir damai negara-negara senjata nuklir. Selama periode perundingan banyak negara non-senjata nuklir kritis terhadap ketentuan perlindungan yang diusulkan sebagai diskriminatif, karena hanya negara-negara non-senjata nuklir yang akan terpengaruh oleh ketentuan perlindungan.¹⁴

Perjanjian NPT ini penting karena sejak diratifikasi oleh negara-negara yang masuk dalam perjanjian tersebut, sejauh ini telah menetapkan kewajiban pada negara-negara nuklir dan non-nuklir untuk menjauhkan diri dari memperluas senjata nuklir. Namun, Perjanjian tersebut memberikan hak kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan penelitian, produksi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi.

¹³ Victor W. Sidel, MD, and Barry S. Levy, MD, MPH, *Proliferation of Nuclear Weapons: Opportunities for Control and Abolition*, American Journal of Public Health, September 2007, Vol 97, No. 9.

¹⁴ *Ibid*

Kebijakan pemerintah sangat penting untuk diskusi tentang tenaga nuklir di AS. Pengembangan tenaga nuklir dimulai sebagai program pemerintah pada tahun 1945 setelah dari Proyek Manhattan untuk mengembangkan bom atom pada masa perang. Reaktor nuklir pertama yang menghasilkan listrik dilaksanakan di *National Reactor Testing Station* (NRTS) di Idaho pada bulan Desember 1951, ketika pemerintah AS mengubah orientasi sumber daya yang signifikan untuk pengembangan penggunaan sipil tenaga nuklir. Pada pertengahan 1950-an, produksi listrik dari tenaga nuklir dibuka untuk industri swasta. Pembangkit listrik tenaga nuklir berskala besar pertama di dunia berada di Shippingport, Pennsylvania, dan dimiliki oleh Komisi Energi Atom A.S, tetapi dibangun dan dioperasikan oleh *Duquesne Light and Power Company* di sebuah situs yang dimiliki oleh perusahaan utilitas di dekat Pittsburgh. Saat ini, hampir semua reaktor komersial di A.S dimiliki oleh perusahaan swasta, dan industri nuklir secara keseluruhan memiliki partisipasi pribadi yang jauh lebih besar, dan kurang konsentrasi, daripada negara lain.¹⁵

A.S sendiri memiliki sejumlah besar perjanjian kerjasama nuklir bilateral dengan berbagai negara, yang ditentukan berdasarkan Bagian 123 dari Undang-Undang Energi Atom AS - jumlahnya 22 pada pertengahan tahun 2012. Sebagian besar dinegosiasikan ketika Amerika Serikat adalah pemasok utama teknologi dan bahan bakar, dan karenanya dengan pengaruh politik dan perdagangan yang lebih besar daripada saat ini. Ada 123 Perjanjian penting pada baru-baru ini dengan India dan Cina. Pada bulan Januari 2011 perjanjian kerjasama nuklir Rusia-A.S mulai berlaku setelah beberapa penundaan - telah ditandatangani pada Mei 2008 tetapi tidak disetujui oleh Kongres.

Negosiasi untuk perjanjian ini telah dimulai sejak pertengahan 1990-an, tetapi pendekatan yang berbeda dilakukan untuk Iran yang kemudian menghentikannya selama satu dekade. Diharapkan untuk mempercepat perdagangan internasional di berbagai bidang dan memungkinkan kerjasama yang lebih besar pada teknologi reaktor dan siklus bahan bakar, serta inisiatif non-proliferasi. Pada bulan September 2013, perjanjian R & D AS-Rusia ditandatangani, memperluas ketentuan pada tahun 2011. Proyek-proyek potensial dapat mencakup pembangunan reaktor neutron cepat melalui pembentukan Pusat Penelitian Cepat Reaktor *Multi-Purpose*, dan juga Rusia yang memberikan akses AS ke reaktor riset neutron

¹⁵ *US Nuclear Power Policy*, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.

cepat BOR-60 untuk iradiasi bahan bakar dan bahan di Dimitrovgrad. Ini juga mencakup masalah perlindungan internasional dan "pertahanan dari asteroid".¹⁶

Pada dasarnya A.S sebagai negara pemilik senjata nuklir serta bagian dari NPT telah dan selalu aktif melakukan kebijakan-kebijakan luar negeri terkait dengan proliferasi maupun non-proliferasi serta kerjasama-kerjasama yang berkaitan dengan nuklir, baik pertukaran informasi, memberikan bantuan, hingga memberikan sanksi jika dianggap telah melanggar kebijakan yang telah disepakati bersama. Dalam sistem demokrasi seperti A.S, para pemimpin dapat menunjukkan berbagai gagasan tentang dan tingkat dukungan untuk multilateralisme dan prinsip-prinsip mengenai nonproliferasi, sebagai fungsi dari ideologi politik, sosialisasi, dan pandangan dunia. A.S akan lebih cenderung berubah kebijakannya tentang kerja sama nuklir dan bantuan nuklir sipil dalam menghadapi perubahan dramatis dalam politik internasional yang membuka jendela kebijakan untuk pertimbangan berbagai alternatif dalam keamanan internasional. Dinamika ini harus dibuktikan secara jelas dalam pernyataan kebijakan umum dan perundingan kasus negosiasi NCA.¹⁷

Jika suatu negara telah mendatangi NPT dan menjadi bagian dalam *regime* NPT, maka diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan yang telah tertera di dalam perjanjian tersebut. Salah satu bagian yang diatur dalam NPT adalah pengeksporan bahan-bahan maupun teknologi nuklir baik ke sesama anggota NPT maupun negara atau organisasi yang tidak termasuk dalam NPT¹⁸. Pengaturan pengeksporan ini kemudian menjadi kontrol yang dilakukan secara berkala oleh AS.

Dalam kontrol ini, A.S telah mengusulkan larangan bahan bakar sebagai cara untuk secara dramatis membatasi penyebaran bahan fisil. Berdasarkan perencanaan ini, jumlah negara yang mampu memproduksi bahan bakar nuklir akan terbatas, dan Kelompok Pemasok Nuklir/*Nuclear Suppliers Group* (NSG) tidak akan dapat menjual peralatan untuk membuat bahan bakar ke negara mana pun yang belum mampu melakukannya. Terdapat salah satu bentuk kontrol dari AS yang merupakan aplikasi dari kebijakan luar negeri mereka terhadap negara-negara Non-NPT yaitu *Proliferation Security Initiative* (PSI). Penggabungan larangan

¹⁶ *US Nuclear Power Policy*, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.

¹⁷ Lantis, Jeffrey, *Nonproliferation and Norm Discourse: An Agentic Constructivist Model of U.S. Nuclear Export Policy Changes*, Wiley Periodicals, Inc, Politics & Policy, Volume 44, No. 2 (2016): 220-260.

¹⁸ Graham, Senator Bob, *THE NUCLEAR NON-PROLIFERATION REGIME: A CRISIS OF CONFIDENCE*, International Law and Policy Review; Hauppauge Vol. 1, Iss. 2, (2011): 147-174.

bahan bakar menggambarkan meningkatnya kekhawatiran akan tantangan program "perlindungan" terhadap rezim. Perencanaan ini akan mengubah salah satu tawaran dasar NPT: kemampuan negara-negara non-senjata untuk menerima teknologi nuklir untuk tujuan damai.

19

Selain melakukan kontrol, A.S memiliki beberapa program perjanjian yang cukup sukses dengan negara-negara anggota NPT, salah satunya dengan Rusia. *Megatons to Megawatts* adalah nama program yang sangat sukses, sebuah perjanjian senjata nuklir dengan Rusia, yang menyediakan sekitar satu setengah dari bahan bakar untuk reaktor komersial AS hingga 2013. Sejak 1987, Amerika Serikat dan negara-negara bekas Uni Soviet telah menandatangani serangkaian perjanjian untuk mengurangi persenjataan nuklir mereka sekitar 80%. Pada tahun 1993, Amerika Serikat dan Rusia mencapai kesepakatan untuk mengubah 500 ton uranium yang diperkaya tinggi (HEU) dari hulu ledak Rusia yang dibongkar menjadi uranium diperkaya rendah (LEU) yang akan dibawa ke A.S untuk digunakan sebagai bahan bakar di reaktor nuklir sipil.²⁰

Pada era Presiden Barrack Obama, beliau berkomitmen bahwa A.S akan mengurangi peran senjata nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pengurangan dalam gudang senjata yang sebenarnya, dan mendesak negara yang lain untuk melakukan hal yang sama. Obama menyerukan ratifikasi dari CTBT/*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, sebuah perjanjian untuk mengakhiri produksi material senjata, memperkuat *Nuclear Non-proliferation Treaty*, termasuk peningkatan inspeksi, sanksi, 'upaya internasional baru untuk mengamankan semua bahan nuklir yang rentan di seluruh dunia dalam empat tahun, dan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis baru dengan Rusia, yang ditandatangani pada tahun 2010. Obama mengakui, bahwa A.S tidak akan bertindak secara sepihak. "Selama senjata-senjata ini ada," kata Obama, "Amerika Serikat akan mempertahankan persenjataan yang aman, aman, dan efektif untuk mencegah musuh, dan menjamin pertahanan itu kepada sekutu kita." Bagi A.S, dilema keamanan akan tetap terjadi.²¹

¹⁹ Graham, Senator Bob, *THE NUCLEAR NON-PROLIFERATION REGIME: A CRISIS OF CONFIDENCE*, International Law and Policy Review; Hauppauge Vol. 1, Iss. 2, (2011): 147-174.

²⁰ *US Nuclear Power Policy*, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.

²¹ Hough et al, *International Security Studies, Theory and Practice*, Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017, 2015.

Analisa

Kebijakan-kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh AS kemudian di implementasikan ke negara-negara lain, baik yang tergabung dalam NPT maupun bukan negara anggota NPT. Tetapi sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dengan sudut pandang A.S. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut diberlakukan di negara seperti India dan Iran. Untuk menganalisa hal tersebut, harus dipahami terlebih dahulu latar belakang, hubungannya dengan AS dan kebijakan-kebijakan pengembangan nuklir di India dan Iran.

- India

Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan India, para pemimpin India mengumumkan pendekatan etis terhadap kebijakan luar negeri India secara umum, dan isu-isu nuklir pada khususnya. Hal ini mencerminkan pandangan yang dipegang teguh pada isu-isu global yang diadopsi oleh negara yang merasa telah memenangkan kemenangan moral di samping kemandirian politiknya. Upaya awal India dalam ilmu nuklir dan teknologi telah berkembang sudah sejak awal, bahkan sebelum kemerdekaan India sendiri. Langkah pertama diambil oleh Dr. Homi Jehangir Bhabha pada Maret 1944 ketika ia mengajukan proposal kepada Yayasan Sir Dorab Tata (didirikan untuk menghormati paman Bhabha sendiri, Sir Dorab Tata) untuk mendirikan lembaga penelitian nuklir, lebih dari tiga tahun sebelum kemerdekaan.²²

Bahkan sebelum pembentukan institusi tersebut, masyarakat di India memiliki akses ke beberapa jurnal ilmiah Barat, yang kemudian memberi India pemikiran secara teoritis untuk lebih maju menuju senjata nuklir daripada sebagian besar negara berkembang lainnya pada saat itu.²³ Pada tahun 1954 program nuklir India mulai bergerak ke arah yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan kemampuan senjata nuklir. Pada 3 Januari 1954 IAEC memutuskan untuk mendirikan fasilitas baru - *Atomic Energy Establishment*, Trombay atau Pendirian Energi Atom, Trombay (AEET), kemudian menjadi "Indian Los Alamos". Pada 3 Agustus 1954, *Department of Atomic Energy* atau Departemen Energi Atom (DAE) dibentuk

²² Ghose, Arundhati, *Negotiating the CTBT: India's security concerns and nuclear disarmament*, Journal of International Affairs; New York Vol. 51, Iss. 1, (Summer 1997): 239-261.

²³ Akhilesh Pillalamarri, *India's Nuclear-Weapons Program: 5 Things You Need to Know*, The National Interest, dalam <https://nationalinterest.org/feature/indias-nuclear-weapons-program-5-things-you-need-know-12697>, diakses pada 29 Juli 2018.

dengan Dr. Bhabha sebagai Sekretaris.²⁴ India kemudian terus mengembangkan teknologi nuklirnya hingga sekarang.

Di bawah kepemimpinan Presiden Bush dan Perdana Menteri Singh, A.S dan India telah bergerak maju untuk membangun ikatan kemitraan strategis. Pada 18 Juli 2005, AS dan India mengumumkan peluncuran Inisiatif Kerjasama Nuklir Sipil, dimana kedua pemimpin tersebut mengumumkan serangkaian inisiatif yang luas sebagai bagian dari komitmen baru untuk hubungan bilateral yang komprehensif.²⁵ Di bawah parameter inisiatif ini, India akan memperlihatkan semua fasilitas nuklir sipilnya untuk perlindungan IAEA. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Dewan Gubernur IAEA menyetujui perjanjian perlindungan India, membuka jalan bagi pertimbangan India di *The Nuclear Suppliers Groups* (NSG) atau Kelompok Pemasok Nuklir, suatu grup kontrol ekspor multilateral yang bertujuan untuk mengurangi proliferasi nuklir dengan cara mengontrol ekspor nuklir yang kemungkinan digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir.²⁶

Sebagai bagian dari keseluruhan inisiatif, India akan memperluas perlindungan internasional, mematuhi pedoman ekspor nuklir dan rudal internasional, melanjutkan moratorium sukarela pada uji coba nuklir, dan memastikan bahwa semua perdagangan nuklir sipil akan digunakan hanya untuk tujuan damai. Kongres AS pada tanggal 1 Oktober 2008, memberikan persetujuan akhir untuk perjanjian yang memfasilitasi kerjasama nuklir antara A.S dan India. Kesepakatan ini dilihat sebagai titik balik dalam hubungan AS-India dan memperkenalkan aspek baru untuk upaya nonproliferasi internasional.²⁷ Perjanjian nuklir AS-India dan transformasinya ke dalam kesepakatan nuklir NSG-India diatas melibatkan pembuatan dan pelarangan aturan internasional. Dengan membebaskan India dari aturan, kesepakatan itu sama dengan penegakan yang tidak selektif.²⁸

Telah diketahui bahwa sebelumnya A.S telah secara aktif mempromosikan kerja sama energi nuklir dengan India sejak pertengahan 1950-an, dengan membangun reaktor tenaga nuklir (Tarapur), menyediakan heavy water untuk reaktor riset CIRUS, dan memungkinkan

²⁴ *India's Nuclear Weapons Program : The Beginning: 1944-1960*, <http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html>, diakses 30 Juli 2018.

²⁵ Victor W. Sidel, Barry S. Levy, *Proliferation of Nuclear Weapons: Opportunities for Control and Abolition*, *American Journal of Public Health*, September 2007, Vol 97, No. 9.

²⁶ Saira Bano, *India's Nuclear Suppliers Group (NSG) Membership and the Nuclear Non-Proliferation Regime*, *Royal Irish Academy, Irish Studies in International Affairs*, Vol 25 (2014).

²⁷ Bajoria Jayshree, Pan Esther, *The U.S.- India Nuclear Deal*, 5 November 2010.

²⁸ Perkovich, George, *Global implications of the U.S.-India deal*, *Perkovich, George. Daedalus; Boston Vol. 139, Iss. 1, (Winter 2010): 20-31,139.*

para ilmuwan India untuk belajar di laboratorium nuklir A.S.²⁹ Di A.S, Kongres merespon hal ini dengan meloloskan *Nonproliferation Nuclear Act of 1978* (NNPA, P.L. 95-242), yang memberlakukan persyaratan baru yang keras pada ekspor nuklir AS untuk negara non-senjata nuklir - pengamanan lingkup penuh dan penghentian ekspor jika negara tersebut meledakkan perangkat peledak nuklir atau terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan perolehan atau pembuatan senjata nuklir, di antara hal-hal lain.³⁰

Mengondisikan ekspor nuklir A.S pada negara-negara non-senjata-nuklir yang memiliki perlindungan kerangka penuh menciptakan masalah terutama untuk reaktor India di Tarapur, yang dibangun oleh perusahaan A.S dan memiliki bahan bakar uranium yang diperkaya rendah AS, berdasarkan perjanjian kerjasama nuklir tahun 1963.³¹ Pernyataan Bersama mencatat bahwa A.S "akan bekerja dengan teman dan sekutu untuk menyesuaikan rezim internasional untuk memungkinkan kerjasama dan perdagangan energi nuklir sipil penuh dengan India, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertimbangan bahan bakar yang cepat untuk persediaan reaktor nuklir yang dilindungi di Tarapur.³² Hubungan bilateral India-A.S telah berkembang menjadi kemitraan strategis global, berdasarkan pada peningkatan konvergensi kepentingan pada isu-isu bilateral, regional dan global. Kunjungan Negara Perdana Menteri Dr. Manmohan Singh ke Washington D.C. dari 22-26 November, 2009 sebagai Tamu Negara pertama Presiden Barack Obama menegaskan kembali kemitraan strategis global antara India dan A.S.

- **Iran**

Iran adalah salah satu negara berkembang dengan mengandalkan sumber daya alam, yaitu minyak bumi yang sayangnya tidak dapat terbarukan. Dengan demikian, Iran harus menghadapi tantangan ledakan demografi tanpa memiliki banyak alat-alat yang diperlukan, seperti struktur negara yang kuat, ekonomi yang tumbuh dengan cepat, sejumlah besar modal investasi, banyak pengusaha, insinyur dan inventor, dan infrastruktur yang cukup maju.³³ Iran tidak dapat diharapkan untuk menghabiskan kekayaan nasionalnya yang tidak terbarukan secara serampangan, tanpa menerima produk atau manfaat abadi sebagai balasannya, tetapi ini

²⁹ Perkovich, George, *Global implications of the U.S.-India deal*, Perkovich, George. *Daedalus*; Boston Vol. 139, Iss. 1, (Winter 2010): 20-31,139.

³⁰ Squassoni, Sharon, *U.S. Nuclear Cooperation With India: Issues for Congress*, Congressional Research Service, The Library of Congress.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part I: Its History*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

akan terjadi jika sumber energi Iran tidak terdiversifikasi, dan Iran terus bergantung hampir secara eksklusif pada minyak dan gas untuk segala sesuatu dari satu-satunya sumber energi ke anggaran tahunannya.³⁴

Sejak awal 1990-an, konsumsi minyak Iran telah meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, hanya 8% per tahun, dan total konsumsi energinya telah meningkat dari 1,6 kuadriliun Btu pada tahun 1980 menjadi lebih dari 5,5 *quads* - peningkatan lebih dari 280%.³⁵ Hal ini merupakan salah satu alasan kuat bagi Iran untuk mencari alternatif energi lain yang lebih memadai dan dapat diperbarui. Jika Iran tidak dapat meningkatkan fasilitas minyak dan industrinya pada waktu yang tepat, Iran akan kehilangan nilai pasarnya. Meskipun tidak ada keraguan bahwa solusi untuk masalah mendesak dalam peningkatan industri minyak Iran sebagian bersifat politis, kurangnya solusi apa pun akan memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan Iran.³⁶

Kemudian pada 9 Februari 2003 terungkap bahwa Iran memiliki pembangunan program Nuklir berfasilitas canggih di Natanz dan beberapa kota lainnya untuk menghasilkan uranium. Presiden pada saat itu, Mohammad Khatami mengumumkan keberadaan fasilitas Natanz (dan fasilitas lainnya) di televisi Iran dan mengundang Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut. Setelah itu, pada akhir Februari, Dr. Mohammad El Baradei, kepala IAEA, ditemani oleh tim inspektur, mengunjungi Iran. Sejak itu, para ahli dan inspektur IAEA telah mengunjungi Iran beberapa kali. Sebuah laporan awal diterbitkan pada bulan Juli, dengan laporan tindak lanjut pada 26 Agustus. Pada tanggal 12 September 2003, IAEA memberi Iran ultimatum untuk mengungkapkan semua rincian kegiatan nuklirnya pada 31 Oktober 2003.³⁷ Oleh karena itu Iran membutuhkan energi alternatif cadangan lainnya.

Program nuklir Iran dan kegiatan pendukungnya, meskipun telah dibicarakan selama bertahun-tahun, telah menjadi fokus yang tajam sejak pengumuman pada bulan Februari. Informasi dan data yang telah diperoleh oleh IAEA, setelah mengunjungi fasilitas Natanz dan beberapa lokasi lain, telah mengejutkan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan Jepang. Mirip dengan pemerintahan Clinton, pemerintahan Bush telah curiga terhadap program nuklir Iran,

³⁴ Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part I: Its History*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part II: Are Nuclear Reactors Necessary?*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

³⁷ *Ibid*

dengan alasan bahwa, memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar, Iran hampir tidak membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Bush berpendapat bahwa tujuan utama program nuklir Iran adalah mengembangkan senjata nuklir.

Menurut perjanjian perlindungan IAEA yang asli, Iran tidak harus menyatakan dimulainya pembangunan fasilitas Natanz. Perjanjian ini menetapkan bahwa, hanya dalam 180 hari sebelum memperkenalkan bahan nuklir apa pun, kemudian Iran harus menyatakan keberadaan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas Natanz yang tidak dideklarasikan BUKAN ilegal. Selain itu, Non-proliferasi Senjata Nuklir (NPT) memungkinkan Iran untuk secara hukum membangun fasilitas nuklir, termasuk untuk pengayaan uranium, selama itu dimaksudkan untuk tujuan damai. Selain itu, NPT memungkinkan negara-negara anggota untuk mengundurkan diri dari perjanjian, dengan memberikan pemberitahuan 90 hari kepada IAEA, jika mereka yakin bahwa mematuhi ketentuan NPT mengancam keamanan nasional mereka (dalam bahasa NPT, jika ada di "*Supreme Interest*" mereka.)³⁸

Sebelumnya pada tahun 1950an hingga 1967, di bawah program *Atoms for Peace* tersebut yang diluncurkan oleh Presiden Eisenhower, A.S menjual kepada Shah Iran Pahlavi (yang opada waktu itu merupakan sekutu A.S), dari pemerintah Iran, sebuah reaktor riset air ringan berkekuatan 5 megawatt. Struktur berbentuk kubah kecil ini, yang terletak di pinggiran Teheran, adalah awal fondasi program nuklir Iran. Struktur tersebut tetap menjadi pusat kontroversi atas niat Iran terhadap pengembangan nuklirnya, bahkan hingga saat ini. Hal itu dikarenakan Iran mengatakan perlu lebih banyak bahan bakar untuk reaktor, yang bersikeras menggunakannya hanya untuk penelitian dasar, dan untuk menghasilkan isotop medis.³⁹ AS membangun reaktor nuklir itu pada tahun 1967 di kampus Universitas Teheran dan dioperasikan oleh AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*). AS juga menyediakan Iran dengan bahan bakar untuk reaktor tersebut - senjata yang diperkaya uranium.⁴⁰

Sebelum kemunduran A.S dalam mendukung program Nuklir Iran, salah satu alasan kebijakan AS untuk mendukung program ini adalah hubungan Iran yang sangat dekat dengan

³⁸ Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part I: Its History*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018

³⁹ Peter Grier, *It Was Uncle Sam Who First Give Iran Nuclear Equipment*, diakses dari <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/1002/p04s01-usfp.html>, diakses pada 30 Juli 2018

⁴⁰ Steve Inskepe, *Born In The USA: How America Created Iran's Nuclear Program*, diakses dari <http://www.npr.org/sections/parallels/2015/09/18/440567960/born-in-the-u-s-a-how-america-ceated-irans-nuclear-program>, diakses 22 Juli 2018

Israel, yang mana selanjutnya kemudian membuat Shah direkomendasikan AS untuk menerima dukungan tersebut. Pada tahun 1960 dan 1970an ketika Iran menjadi salah satu penerima tersebar persenjataan AS, Shah dianggap sebagai kandidat yang berhak untuk menerima bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi energi nuklir dan mampu mengurangi penggunaan energi minyak.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa A.S lah yang memberikan penawaran kepada Iran untuk melebarkan sayap pada sumber energi lain selain minyak, oleh karena itu Iran membutuhkan tambahan beberapa reaktor nuklir yang memenuhi standar kapasitas listrik untuk pengembangan industrialnya. Perusahaan-perusahaan A.S mengungkapkan ketertarikan mereka untuk membangun reaktor-reaktor tersebut. Singkatnya, sejak akhir 1950an hingga mendekati revolusi Iran Eropa dan pemerintahan A.S serta perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program nuklir Iran selalu membujuk dan membantu Shah dalam membangun program nuklirnya, walaupun Barat sadar, namun karena alasan-alasan politik menolak untuk menyadarinya, bahwa hal ini bisa melangkah ke arah bom atom.⁴¹

Kesimpulan

Kesepakatan Nuklir India-A.S ini bertentangan dengan tujuan nonproliferasi yang diakui oleh komunitas internasional dan pelanggaran komitmen nonproliferasi negara-negara anggota NPT dan NSG. Hanya beberapa suara terisolasi di komunitas pengontrol senjata internasional yang menyuarakan keprihatinan. Seorang akademisi AS terkemuka, George Perkovich dari *Carnegie Endowment* “pada saat perjanjian itu diumumkan, secara perseptif antar-alia mencatat bahwa dua tujuan A.S adalah bahwa India yang lebih kuat akan menyeimbangkan pertumbuhan kekuatan dan pengaruh Tiongkok (Cina) di Asia, dan bahwa perubahan nasional dan hukum internasional tentang kerja sama nuklir juga akan membantu meningkatkan kemampuan strategis India, termasuk senjata nuklir dan rudal balistik, yang selanjutnya akan menyeimbangkan kekuatan strategis Cina ”⁴²

Sedangkan Iran dianggap dianggap sebagai negara yang dipimpin dengan rezim “rouge” sehingga kepemilikan nuklir hanya akan berdampak buruk untuk AS dan negara-

⁴¹ Tarock, Adam, *Iran's Nuclear Programme and The West*, Third World Quarterly, Vol. 27, No. 4, pp 645 – 664, 2006.

⁴² Hyder, Tariq, *Indo-US Nuclear Deal and Pakistan The Years Ahead*, IPS event on the subject on June 27, 2013.

negara barat mengingat ketidakpercayaan AS dan sekutunya terhadap Iran. Namun dari analisa bab sebelumnya terlihat bahwa hal ini timbul karena perbedaan *interest* AS dan tujuan Iran . Di satu sisi AS mungkin, *double standard* ini membantu negara- negara yang memperhatikan kepentingan geopolitik dan ekonomi Washington dalam program nuklir mereka; di sisi lain, AS terlihat mencoba untuk mencegah negara-negara yang tidak setuju dengan kebijakan luar negeri AS dalam menguasai teknologi nuklir.

Daftar Pustaka

- Akhilesh Pillalamarri, *India's Nuclear-Weapons Program: 5 Things You Need to Know*, The National Interest, dalam <https://nationalinterest.org/feature/indias-nuclear-weapons-program-5-things-you-need-know-12697>, diakses pada 29 Juli 2018.
- Bajoria Jayshree, Pan Esther, *The U.S- India Nuclear Deal*, 5 November 2010.
- Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2011, hlm. 240-241.
- Cipto, Bambang, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran Buku, Yogyakarta, 2007, hlm 201.
- *Export Policy Changes*, Wiley Periodicals, Inc, Politics & Policy, Volume 44, No. 2 (2016): 220-260.
- Ghose, Arundhati, *Negotiating The CTBT: India's Security Concerns And Nuclear Disarmament*, Journal of International Affairs; New York Vol. 51, Iss. 1, (Summer 1997): 239-261.
- Graham, Senator Bob, *THE NUCLEAR NON-PROLIFERATION REGIME: A CRISIS OF CONFIDENCE*, International Law and Policy Review; Hauppauge Vol. 1, Iss. 2, (2011): 147-174.
- Hough et al, *International Security Studies, Theory and Practice*, Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017, 2015.
- Hyder, Tariq, *Indo-US Nuclear Deal and Pakistan The Years Ahead*, IPS event on the subject on June 27, 2013.
- *India's Nuclear Weapons Program : The Beginning: 1944-1960*, <http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html>, diakses 30 Juli 2018.
- Juwono Sudarsono (dkk), *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996. Baca juga Indraya Smita Notosusanto, *Politik global Amerika Serikat Pasca Perang Dingin*, 1996, hal. 177
- Lantis, Jeffrey, *Nonproliferation and Norm Discourse: An Agentic Constructivist Model of U.S. Nuclear*
- Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part I: Its History*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.Payvand.com, 30 Juli 2018.

- Mohammad Sahimi, *Iran's Nuclear Program, Part II: Are Nuclear Reactors Necessary?*, Payvand's Iran News, Diakses dari www.payvand.com, 30 Juli 2018.
- Perkovich, George, *Global implications of the U.S.-India deal*, Perkovich, George. Daedalus; Boston Vol. 139, Iss. 1, (Winter 2010): 20-31,139.
- Perwita, A G B dan Yani, Y M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 49.
- Peter Grier, *It Was Uncle Sam Who First Who First Give Iran Nuclear Equipment*, diakses dari <https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2009/1002/p04s01-usfp.html>, diakses pada 30 Juli 2018.
- Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 502-503.
- Saira Bano, *India's Nuclear Suppliers Group (NSG) Membership and the Nuclear Non-Proliferation Regime*, Royal Irish Academy, Irish Studies in International Affairs, Vol 25 (2014).
- Salman, Muhammad, Geeraerts, Gustaaf, *Strategic Hedging and Balancing Model under the Unipolarity*, Midwest Political Science Association 2015, April 16-19, Chicago, USA.
- Squassoni, Sharon, *U.S. Nuclear Cooperation With India: Issues for Congress*, Congressional Research Service, The Library of Congress.
- Steve Inskepe, *Born In The USA: How America Created Iran's Nuclear Program*, diakses dari <http://www.npr.org/sections/parallels/2015/09/18/440567960/born-in-the-u-s-a-how-america-ceated-irans-nuclear-program>, diakses 22 Juli 2018.
- Tarock, Adam, *Iran's Nuclear Programme and The West*, Third World Quarterly, Vol. 27, No. 4, pp 645 – 664, 2006.
- UNODA, <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>, diakses 12 Juli 2018.
- *US Nuclear Power Policy*, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.
- Utari Romauli Sitorus, *Studi Hubungan Internasional*, diakses 12 Oktober 2016
- Victor W. Sidel, Barry S. Levy, *Proliferation of Nuclear Weapons: Opportunities for Control and Abolition*, American Journal of Public Health, September 2007, Vol 97, No. 9.